

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Simpulan Umum

Cak Nur dan Gus Dur merupakan gambaran warga negara yang telah menunjukkan komitmen dan kontribusinya dalam membangun dan menguatkan demokrasi dan *civil society* di Indonesia melalui pemikiran, interpretasi, dan kontekstualisasi pemahaman ajaran dan nilai-nilai keislaman dalam konteks keindonesiaan dan kemodernan. Islam di Indonesia yang sebelumnya berada dalam area marginal dan dicurigai oleh rezim dan sebagian masyarakat Indonesia karena akan menjadi ideologi negara dengan menggantikan posisi ideologi Pancasila, melalui pemikiran dan gerakan Islam kultural yang dilakukan Cak Nur dan Gus Dur telah menggeser dari Islam ideologis menjadi Islam kultural dan berubah dengan menjadikan Islam sebagai faktor pendorong dan determinan serta berada dalam posisi sentral dan strategis dalam pembangunan bangsa pada berbagai dimensi. Selain itu melalui pemikiran, reinterpretasi dan pemaknaan Cak Nur dan Gus Dur terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam secara kontekstual dalam kehidupan politik pada negara bangsa telah menjadikan Islam sebagai faktor yang semakin memperkuat keberadaan negara bangsa dan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang final bagi bangsa Indonesia termasuk di dalamnya umat Islam Indonesia.

Sebagai seorang tokoh bangsa –karena Cak Nur dan Gus Dur telah berperan sangat signifikan dalam penguatan demokrasi dan *civil society* serta menjadi tempat bertanya, berdialog dan berdiskusi dalam berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan terutama dalam kaitan dengan posisi Islam dalam negara bangsa-, sebagai guru bangsa – karena banyak menghasilkan karya tulis dengan tema yang beragam untuk dijadikan referensi dan sumber inspirasi warga negara dalam merespon berbagai masalah sosial, politik, dan kemanusiaan-, dan sebagai intelektual neo-modernis –karena Cak Nur dan Gus Dur telah menaruh kepedulian dan tanggungjawabnya yang besar dalam menginterpretasikan dan memformulasikan tidak saja berdasarkan keilmuan yang

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN *CIVIL SOCIETY* DI INDONESIA
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dimiliki, melainkan dalam lingkup permasalahan kebangsaan dan kenegaraan yang multi dimensional dengan menerapkan pendekatan tradisi keilmuan dan khazanah keislaman klasik dan pendekatan ilmu sosial dalam kerangka kontekstualisasi dan pribumisasi ajaran dan nilai-nilai Islam- yang telah menunjukkan komitmen dan tanggungjawab yang tinggi terhadap berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan –isu-isu kewarganegaraan- melalui gagasan, pemikiran dan gerakan sosiokultural kewarganegaraan. Cak Nur dan Gus Dur adalah dua intelektual yang mempunyai latar belakang sosiokultural yang sama yaitu berasal dari keluarga santri. Meskipun dalam perjalanannya kedua tokoh ini menempuh pola pendidikan yang berbeda di mana Cak Nur memasuki dunia pendidikan modern, sedangkan Gus Dur berada dalam lingkungan pendidikan tradisional. Namun demikian kedua warganegara ini berada dalam satu fokus perjuangan dan gerakan pada titik yang sama yaitu artikulasi, kontekstualisasi, pribumisasi dan sekularisasi dalam ajaran Islam dalam konteks negara bangsa dan tatanan global.

Pemikiran politik Cak Nur dan Gus Dur terkait dengan relasi Islam dan politik mengambil paradigma substantif bercorak neo-modernisme di mana artikulasi ajaran dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan menghindari adanya formalisasi syariah dan simbolisasi agama dalam tatanan kenegaraan dengan tetap berpegang pada tradisi dan khazanah klasik keislaman. Dengan demikian bagi kedua intelektual ini artikulasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara lebih mengedepankan dimensi substantifnya seperti negara Pancasila dan *nation state* yang menurut pemikiran Cak Nur dan Gus Dur merupakan bentuk final bagi bangsa dan negara Indonesia termasuk umat Islam di dalamnya. Dengan kata lain, negara Pancasila merupakan bentuk final bagi umat Islam Indonesia dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu menjadikan Indonesia sebagai negara berideologi Islam secara formal merupakan sesuatu yang ahistoris. Selanjutnya pola gerakan yang dilakukan oleh Cak Nur dan Gus Dur menggunakan pola gerakan Islam kultural dalam melakukan pemberdayaan dan pencerahan kewarganegaraan khususnya kepada umat Islam.

Secara strategi dan teknik gerakan, kedua intelektual ini menetapkan sasaran targetnya yang berbeda di mana Cak Nur lebih mengorientasikan pada kelas menengah, sedangkan Gus Dur mengorientasikan sasaran gerakannya kepada *grassroot* terutama melalui warga NU di samping juga mengorientasikan kepada kelas menengah. Namun demikian dalam perjalanannya, arah perjuangan Cak Nur dan Gus Dur mengalami pergeseran dari gerakan kultural menuju gerakan politik. Cak Nur pernah mau terlibat dalam pencalonan presiden melalui Partai Golkar dengan kesediaannya mengikuti konvensi Partai Golkar. Upaya tersebut kandas karena Cak Nur tidak melanjutkan keikutsertaannya dalam konvensi Partai Golkar dan Cak Nur kembali ke gerakan kultural. Adapun Gus Dur dengan mendirikan partai politik yaitu PKB yang meskipun dalam perjalanannya terjadi konflik dan Gus Dur tergeser dari posisi pentingnya di PKB.

2. Simpulan Khusus

a. Perkembangan Sejarah Sosial Intelektual Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dalam Peta Intelektual Indonesia

Nurcholish Madjid (Cak Nur) dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah dua aktor intelektual muslim neo-modernis yang berlatar belakang tradisi santri yang sangat kuat. Kekuatan pribadi kedua intelektual tersebut bukan saja karena pembentukan oleh lingkungan pendidikan dan interaksi sosiologisnya, melainkan karena secara genealogis dan kultural keduanya memang berasal dari latar belakang keluarga yang memegang tradisi santri yang sangat kuat. Orang tuanya adalah sebagai tokoh agama dan aktivis politik Islam. Ayah Cak Nur berasal dari lingkungan tradisi keagamaan yang berkultur Nahdlatul Ulama (NU) dan tetap memegang tradisi keagamaan ala NU secara kuat serta berhaluan politik modern yaitu Partai Masyumi. Sementara Gus Dur secara geneologis dan dalam perkembangannya hidup dan besar dalam lingkungan tradisi keagamaan NU. Gus Dur adalah pewaris tradisi NU yang sangat kuat dan solid karena latar belakang keluarga dan jaringan intelektual yang dilaluinya sebagian besar dalam tradisi NU. Meskipun demikian tradisi NU yang membentuk Gus Dur tidak menghalanginya untuk

bersentuhan dan menjalin pergumulan intelektual dengan berbagai wacana dan isu-isu modernitas dan dunia global.

Cak Nur dan Gus Dur merupakan “guru bangsa, intelektual muslim neo-modernis” yang mengilhami seluruh negeri dengan gagasan moderat, plural, toleran, demokratis serta cara berpikir inklusif, dinamis, responsif, kritis dan rasional dalam mengartikulasikan dan mengkontekstualisasikan pemahaman keislaman dalam realitas keindonesiaan yang plural dan multikultural. Kedua intelektual ini merupakan lokomotif kaum intelektual generasi 1970-an. Perjalanan hidup Cak Nur dan Gus Dur mencerminkan sejarah panjang pergulatan pemikiran umat Islam Indonesia dari seorang santri yang menjadi tokoh nasional dan bereputasi internasional serta mampu membawa citra Islam Indonesia yang modern, toleran, moderat, damai dan terbuka dengan dinamika zaman dan perubahan sosial.

Dalam masa sekitar 35 tahun, Cak Nur dan Gus Dur menyemai pemikiran keislaman dan politik yang progresif dengan tetap berpijak pada tradisi keilmuan Islam perennial –tradisi keilmuan Islam klasik- di Indonesia. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Cak Nur dan Gus Dur sebagai seorang ilmuwan, akademisi, intelektual muslim neo-modernis yang mumpuni bukan hanya sebagai tokoh intelektual yang mempunyai reputasi nasional semata, melainkan telah mendapat rekognisi internasional sekaligus sebagai juru bicara Islam Indonesia khususnya masalah Islam dalam kaitannya dengan isu-isu global. Secara nasional Cak Nur dan Gus Dur telah menjadi tokoh bangsa sekaligus sebagai tokoh reformasi Indonesia bersama dengan tokoh reformasi lainnya seperti Amin Rais.

Begitu banyak karya yang telah ditulisnya dan tema yang menjadi fokus kajiannya membuat Cak Nur dan Gus Dur sebagai intelektual yang kepekarannya bukan hanya seperti seorang professor satu bidang keilmuan (Cak Nur) atau seorang ulama-kyai (Gus Dur), tetapi juga seorang intelektual ensiklopedis yang menggambarkan banyak dan luasnya pengetahuan yang dimiliki dan kepedulian tindakan yang ditunjukkan melalui gerakan kultural oleh Cak Nur dan Gus Dur terutama mengenai Islam dalam relasinya dengan berbagai permasalahan tatanan kehidupan politik kemodernan. Karena itu sewaktu masih hidup dan dengan karya-karya yang dihasilkannya Cak Nur dan Gus Dur

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

selalu menjadi tempat bertanya, mulai dari mahasiswa, cendekiawan, ulama, duta besar, presiden bahkan calon presiden. Khusus bagi Gus Dur karena memang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, maka kalangan masyarakat lapis bawah (grassroot) juga menjadi tumpuan bertanya bahkan sampai Gus Dur meninggal masih banyak kalangan masyarakat yang melakukan ziarah kubur ke makam Gus Dur di Jombang. Profilnya yang rendah hati, bersahaja, dan penuh kesederhanaan, membuat banyak orang mencintai dan menjadikannya sebagai sumber inspirasi pemikiran.

Cak Nur dan Gus Dur memang sumber pemikiran Islam di Indonesia, bukan hanya pada generasinya, tetapi lebih-lebih pada generasi pasca Cak Nur dan Gus Dur. Begitu komprehensifnya pemikiran keislaman Cak Nur dan Gus Dur, sehingga pikiran-pikiran Islam pasca Cak Nur dan Gus Dur, hanya catatan kaki atas pemikiran Cak Nur dan Gus Dur -setuju atau tidak setuju- dengan pandangan tersebut dalam realitasnya. Belum ada pemikiran Islam pasca Cak Nur dan Gus Dur yang melampaui. Perkembangan pemikiran Islam menjadi fakta mengenai kebangkitan dunia Islam dari Indonesia. Sebuah mimpi yang penuh harapan, karena pada dasarnya Islam di Indonesia itu memiliki karakteristik sebagai Islam moderat, toleran dan berkemajuan karena mengalami dialektika dengan realitas kesejarahan dan sosial budaya. Dengan pemikirannya yang liberal, akan membawa wajah Islam Indonesia berbeda dari wajah Islam Timur Tengah.

Pemaknaan dan penafsiran Cak Nur dan Gus Dur terhadap doktrin Islam dan sumber pokok ajaran Islam tidak semata-mata hanya menggunakan pendekatan normatif, melainkan menggunakan pendekatan historis, sosiologis, dan budaya dengan menggunakan kerangka analisis hermeneutic sehingga pemikiran Islam yang dihadirkan tidak saja sebagai ajaran normatif-dogmatis, melainkan sebagai ajaran yang artikulatif, membumi dan kontekstual sejalan dengan dinamika social, politik dan budaya serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer. Karena itu kritisisme dan kebebasan berpikir merupakan spirit pemikiran Cak Nur dan Gus Dur dalam memahami teks ajaran Islam dan memformulasikannya secara kontekstual.

Cak Nur dan Gus Dur adalah warganegara yang dalam istilah *leadership* sebagaimana yang dikemukakan Stephen Covey, dalam *The 8th Habit* (2004) adalah

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

warga negara telah menemukan *inner voice*-nya. Cak Nur dan Gus Dur bukan saja telah menemukan, tetapi telah berbuat untuk pemenuhan *inner voice*-nya. Cak Nur dan Gus Dur telah memenuhi *calling*-nya, dan memberi inspirasi serta pembelajaran pada kita untuk menemukan *inner voice* kita sendiri. Misi hidupnya amat jelas, yaitu menyiapkan umat Islam dan bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadaban kewarganegaraan bagi sebuah bangsa yang ber peradaban, adil, terbuka, dan demokratis.

b. Paradigma Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dan Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Lahirnya Model Pemikiran Politik Kedua Tokoh tersebut

Cak Nur dan Gus Dur memandang Islam sebagai agama yang *kompatibel* dengan kemodernan dan adaptif dengan konteks keindonesiaan. Karenanya Islam modern yang dikonstruksi Cak Nur dan Gus Dur berbeda dengan Islam modern yang dibangun oleh “modernis klasik” yang begitu terpesona dengan Islam politik, sehingga cenderung tercerabut (*uprooted*) dari tradisi Islam klasik (*al-turats al-Islamiyyah*). Cak Nur dan Gus Dur menekankan pentingnya warisan klasik Islam yang dimaknai secara selektif dan kritis dapat dijadikan sebagai dasar referensi untuk mengembangkan sebuah “Islam modern”. Hal tersebut merupakan karakter dari gerakan pemikiran Islam yang bermazhab “neo-modernisme”.

Sebagai contoh, Cak Nur sering mengutip pengalaman Turki modern sejak masa Turki Muda dan Kemal Ataturk yang mengorbankan warisan Islam demi memeluk modernitas yang mereka pahami dan aktualisasikan sebagai “liberalisasi” dan “westernisasi”. Cak Nur sering membandingkan pengalaman Turki tersebut dengan Jepang sejak masa Reformasi Meiji yang melakukan modernisasi dengan tetap memegang kuat warisan tradisinya. Bagi Cak Nur, jika kaum muslim ingin maju dalam modernisasi dan modernitasnya, mereka hendaknya belajar dari pengalaman Jepang, bukan Turki. Dengan demikian Islam yang dihadirkan oleh Cak Nur adalah Islam peradaban yang memakai istilah Amin Abdullah adalah Islam historis atau oleh Gus Dur disebut sebagai Islam yang membumi dengan realitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang plural dan multikultural. Oleh karena itu bila umat Islam sebagai bagian terbesar

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dari warga negara Indonesia dapat memahami dan mengartikulasikan beragam gagasan dan pikiran Cak Nur dan Gus Dur secara jernih dan bijak menjadi kekuatan yang sangat potensial dan fenomenal dalam tatanan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Hal penting dari Cak Nur dan Gus Dur terutama dalam mendorong agenda nasional yaitu penguatan demokrasi yang berlandaskan nilai dan norma-norma keislaman sebagai sistem nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan umat Islam menjadi kelompok masyarakat madani (*civil society*) yang menempati posisi sebagai mitra strategis negara dalam menjalankan tujuan dari bernegara tersebut sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945.

Agama dalam pemikiran Cak Nur dan Gus Dur sangat sarat mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang merupakan produk dari peradaban manusia sebagai peradaban kaum Muslim, yaitu peradaban yang mengasumsikan adanya titik tolak penciptaannya. Oleh orang-orang yang mempunyai komitmen kepada nilai-nilai Islam yang berintikan taqwa kepada Allah dan usaha mencapai ridla-Nya. Peradaban adalah fungsi kekhalifahan ummat manusia. Kekhalifahan itu (yaitu posisi manusia sebagai khalifah atau pengganti Tuhan di bumi), diberikan karena manusia memiliki kemampuan mengenal dan memahami lingkungan hidupnya (“mengetahui nama-nama wujud sekelilingnya”), dan tidak diberikan kepada malaikat meskipun mereka ini sangat religius. karena bertujuan menuntun manusia mencapai kebahagiaan. Tetapi ia bukanlah kemanusiaan yang berdiri sendiri, melainkan kemanusiaan yang memancar dari Ketuhannan (*habl min al-nâs* yang memancar dari *habl min Allâh*). Kemanusiaan itu diwujudkan justru dengan tidak membatasi tujuan hidup manusia hanya kepada nilai-nilai sementara (*al-dunyâ*) dalam hidup di bumi (*terrestrial*) ini saja, tetapi menerabas dan menembus langit (*ecclesiastical*), mencapai nilai-nilai tertinggi (*al-matsal al-a‘lâ*) yang abadi di akhirat yaitu perkenan Tuhan yang telah mengangkatnya sebagai penguasa di bumi.

Pemikiran Cak Nur dan Gus Dur, sebagaimana yang tertuang dalam karya-karyanya telah memengaruhi wacana pemikiran Islam di Indonesia. Rasanya sulit memisahkan nama Cak Nur dan Gus Dur dengan pemikiran Islam di Indonesia. Bahkan boleh dikatakan, pemikiran Islam pasca Cak Nur dan Gus Dur merupakan kelanjutan

usaha kerja kerasnya sejak mengemukakan gagasan-gagasan yang amat progresif tentang liberalisasi pemikiran Islam, sekularisasi, kebebasan intelektual, dan pentingnya mengapresiasi gagasan kemajuan. Cak Nur dan Gus Dur adalah model warga negara yang dijuluki sebagai “Guru Bangsa” yang banyak memikirkan bagaimana Indonesia menjadi sebuah bangsa yang berperadaban tinggi. Pemikiran-pemikirannya tidak hanya terbatas mengenai pemikiran keislaman dalam lingkup yang sempit –hanya memuat aspek akidah dan ibadah an sich- tetapi juga meliputi pemikiran tentang ke Indonesiaan modern sebagai negara bangsa yang plural dan multikultural dalam memasuki dunia global.

Pemikiran politik Cak Nur dan Gus Dur dilakukan untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi dan politik negara dan bangsa Indonesia. Cak Nur dan Gus Dur menjadi aktor, lokomotif dan intelektual yang banyak melontarkan pemikiran dan gagasan pembaruan politik, seperti ide pentingnya oposisi loyal, *civil society*, demokrasi, Pancasila sebagai *common platform* bangsa di tengah nilai-nilai keagamaan, pluralisme, hak asasi manusia (HAM). Kontribusi pemikiran Cak Nur dan Gus Dur bukan hanya berkaitan dengan umat Islam, tetapi juga bangsa Indonesia. Dengan demikian, tema pokok pemikiran Cak Nur dan Gus Dur adalah keislaman, kemodernan, kebangsaan, kemanusiaan, dan keindonesiaan. Untuk itu, tema pemikiran yang menopang tema pokok tersebut adalah pembaruan pemikiran keislaman terkait dengan sekularisasi, pluralisme, pribumisasi, demokratisasi, humanisasi. Tema pokok pemikiran Cak Nur dan Gus Dur tidak bisa dipisahkan dari visi neomodernisnya sebagai warganegara santri terpelajar yang memahami kompleksitas relasi Islam dengan dunia modern, dan mengerti bagaimana sebagai seorang Muslim hidup di dunia modern terutama berhadapan dengan isu-isu pemikiran baru atau modern.

Cak Nur dan Gus Dur begitu penuh perhatian memikirkan kondisi keberagaman umat Islam Indonesia. Wajah Indonesia, dalam keyakinan Cak Nur dan Gus Dur, akan ditentukan oleh wajah umat Islam di Indonesia di mana wajah Islam Indonesia akan ditentukan oleh apa yang ditanam sekarang. Atas dasar itu, Cak Nur dan Gus Dur memikirkan perlunya menumbuhkan wajah Islam yang hanif, yaitu Islam yang toleran,

moderat dan penuh kelapangan, Islam yang universal dan berorientasi pada kemanusiaan dan peradaban.

Dihadapkan persoalan mengenai kebangkitan fundamentalisme dan radikalisme Islam, Cak Nur dan Gus Dur memberikan solusi Islam yang hanif dan modern. Dengan menegaskan pentingnya kerja sama dan solidaritas agama-agama. Karena setiap agama bisa memberi kontribusi dengan etika keagamaannya pada masalah global. Atas keyakinan ini, salah satu isu yang amat penting, yang terus dikemukakan Cak Nur dan Gus Dur dalam banyak kesempatan, adalah pluralisme pada masyarakat di Indonesia penting bukan hanya dari segi teologis, karena bagian dari ketentuan Tuhan yang tak terelakkan. Pluralisme itu dikembangkan lebih jauh dalam hubungan agama-agama di Indonesia dan dalam tataran global. Pengembangan pluralisme tersebut dilakukan dengan cara meletakkan pluralisme dalam bingkai penguatan demokrasi, masyarakat madani (*civil society*), dan peradaban. Jika bangsa Indonesia bersedia dengan sungguh-sungguh membangun demokrasi substansial, masyarakat madani (*civil society*), dan peradaban. Pluralisme adalah inti dari nilai keadaban itu sendiri, maka dengan sendirinya akan tercapai penegakan hukum yang adil dan pelaksanaan HAM yang tepat sesuai dengan koridor dan rambu-rambu dalam penegakan HAM yang diikuti dengan pelaksanaan KAM (kewajiban asasi manusia) secara seimbang dan proporsional.

Menurut Cak Nur dan Gus Dur, ada keterkaitan antara nilai-nilai keimanan, yang berupa keadilan dan keterbukaan dengan demokrasi. Demokrasi yang sehat dan substantif, menurut Cak Nur dan Gus Dur memerlukan *check and balance*. Ada kekuatan pemantau dan pengimbang. Ia bersandar pada pandangan filosofis bahwa manusia itu tidak mungkin selalu benar, karena itu harus ada cara untuk saling mengingatkan, apa yang tidak baik dan tidak benar. Salah satu contoh yang dikemukakan Nurcholish Madjid adalah perihal orang yang menyatakan hendak mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni, tetapi dalam pelaksanaannya belum tentu benar. Oleh karena itu, menurutnya, dalam masyarakat harus ada mekanisme untuk tukar pikiran atau yang dalam bentuk lebih canggih, adalah "adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan akademik, kebebasan pers, dan sebagainya".

Cak Nur dan Gus Dur di samping menempatkan demokrasi sebagai prinsip, sistem atau aturan permainan dalam politik, juga sebagai cara hidup (*way of life*), karenanya demokrasi sangatlah terkait erat dengan masyarakat madani. Menurut Nurcholish Madjid, demokrasi memang menampakkan salah satu sisinya dalam pemilihan umum yang bebas dan pemberian suara secara rahasia. Akan tetapi, demokrasi tidak berhenti di situ. Demokrasi mesti “tinggal” di tengah masyarakat. Masyarakat itulah yang disebut masyarakat madani (*civil society*). Dalam masyarakat madani, terdapat berbagai perserikatan, persatuan, federasi yang bergabung untuk menjadi perisai antara negara dan warganya. Semua proses pengambilan keputusan pada dasarnya harus dilakukan secara cukup terbuka sehingga diketahui dan dapat diawasi oleh umum, demi jaminan bahwa proses-proses itu tidak menyimpang dari tujuan hidup bernegara, yaitu masalah umum. Demokrasi sebagai musyawarah untuk mufakat menuntut dikembangkannya wacana umum (*public di* Cak Nur dan Gus Dur disebut sebagai pemikir “neo-tradisionalis”.indigenis, neo-modernis, substantif-kultural, formalistik, kulturalistik, penyimbang moralitas politik, pembaru teologi, pemikir modern, dan demokrat religius-substansialis , substantif-kultural,

Cak Nur dan Gus Dur tidak ingin menampilkan politik Islam yang monoton dan formalistik. Akan tetapi menempatkan Piagam Madinah sebagai justifikasi bagi manifestasi politik Islam yang inklusif, yaitu politik Islam yang menekankan pada nilai-nilai substansial Islam yang universal seperti keadilan, persamaan, kebebasan, dan *syura*’ (demokrasi). Cak Nur dan Gus Dur sangat kritis terhadap bentuk formal dan simbol-simbol politik Islam yang seringkali diperankan mengingkari substansi dari nilai-nilai Islam tersebut. Cak Nur dan Gus Dur berkeyakinan bahwa nilai-nilai universal Islam selaras dengan nilai-nilai Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948 sehingga dia melihat Barat bukan sebagai musuh tetapi sebagai mitra. Namun Cak Nur dan Gus Dur perlu mengembangkan konsep HAM dari lingkungan umat Islam sendiri untuk menangkal proses sekulerisasi seperti yang terjadi dalam peradaban Barat.

Latar belakang keluarga yang santri dan lingkungan sosial serta pendidikan yang lalui oleh Cak Nur dan Gus Dur menjadi faktor yang signifikan dalam membentuk pola

dan karakter pemikiran keislaman dan politik yang diproduksi oleh kedua intelektual asal Jombang ini. Penguasaan akan ilmu keislaman yang mumpuni dan kemampuan menggunakan ilmu sosial sebagai kerangka dan pendekatan dalam menterjemahkan, menginterpretasikan dan pemahamannya yang mumpuni akan realitas sosial politik bangsa Indonesia dan umat Islam pada khususnya telah mendorong kedua intelektual neo-modernis ini untuk mengkontekstualisasikan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern dan berbagai isu-isu mutakhir kewarganegaraan dalam skala nasional dan internasional menjadi faktor pembeda produk pemikiran keislaman dan politik Cak Nur dan Gus Dur berbeda dengan produk pemikiran intelektual muslim generasi sebelumnya yang lebih berorientasi pada peletakkan Islam sebagai Ideologi dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan, sedangkan Cak Nur dan Gus Dur meletakkan Islam sebagai landasan etis, spiritual dan moral kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.

c. Pola Gerakan Sosiokultural Kewarganegaraan dan Pengembangan Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*): Titik Temu Gagasan dan Praksis Gerakan Sosiokultural Kewarganegaraan antara Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid

Temuan penelitian menegaskan bahwa Nurcholis Majid dan Abdurrahman Wahid merupakan dua warga negara yang berasal dari daerah dan latar belakang kultural yang sama, Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid berada dalam titik temu paradigma yang sama sebagai seorang pemikir dan intelektual neo-modernis dalam merespon masalah-masalah kewarganegaraan. Pemikiran politik Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid berpandangan bahwa Islam sebagai ideologi dan agama di Indonesia menjadi faktor utama dalam mendorong modernisasi Indonesia, meneguhkan semangat kebangsaan yang multikultural dan menjadikan nilai dan substansi ajaran Islam sebagai etos dan nilai-nilai keadaban dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan tanpa harus menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, tetapi Negara yang berdasarkan Pancasila. Kedua tokoh ini menempuh gerakan Islam kultural sebagai model dari gerakan sosiokultural kewarganegaraan untuk penguatan demokrasi dan *civil society* di

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN *CIVIL SOCIETY* DI INDONESIA
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Indonesia melalui pengembangan nilai-nilai keadaban keawarganegaraan yang dijadikan sebagai acuan dalam etika sosial politik bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai keadaban kewarganegaraan yang dirumuskan Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid sebagai berikut: pluralitas, penghargaan terhadap perbedaan, kebersamaan, silaturahmi, penghormatan terhadap minoritas, humanitarian, kebangsaan, empati, toleran, egaliter, solidaritas bangsa, keadilan sosial, Nilai-nilai keadaban kewarganegaraan tersebut dapat mendorong lahirnya keadaban demokrasi (*democracy civility*) dan menguatkan keberadaan dan peran *civil society* di Indonesia.

d. Dampak dan Relevansi Pemikiran Politik dan Gerakan Sosiokultural Kewarganegaraan Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dalam Penguatan Demokrasi dan *Civil Society* dalam Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*) di Indonesia

Pemikiran politik dan gerakan sosiokultural kewarganegaraan Cak Nur dan Gus Dur telah menggambarkan citra diri sebagai seorang warga negara yang visioner, berkomitmen tinggi terhadap berbagai permasalahan yang terkait dengan pengembangan budaya politik dan keadaban kewarganegaraan. Menjadi visioner itu merupakan wujud nyata peran Cak Nur dan Gus Dur yang sebenarnya. Cak Nur dan Gus Dur sebenarnya menggariskan paham Islam yang *shâlih li kulli zamân wa makân* (Islam yang relevan untuk tiap masa dan tempat). Jadi, yang Cak Nur dan Gus Dur perjuangkan dan kembangkan adalah nilai-nilai Islam universal, Islam moderat dan *Islam rahmatan lil ‘alamiin* dengan menunjukkan bahwa apa yang utama dan apa yang hebat dalam pandangan-pandangan zaman sekarang, serta penemuan-penemuan jenius kemanusiaan modern yang sebenarnya tidak asing di dalam khazanah Islam. Cak Nur dan Gus Dur menunjukkan hal itu dalam soal perkembangan sains, pemikiran politik, demokrasi, *civil society* dan isu-isu kewarganegaraan lainnya yang sesungguhnya telah menjadi focus perhatian dari kalangan ulama Islam klasik, abad pertengahan, modern dan kontemporer.

Dampak yang ditimbulkan oleh pemikiran politik dan gerakan sosiokultural kewarganegaraan dalam membangun dan menguatkan demokrasi serta masyarakat

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN *CIVIL SOCIETY* DI INDONESIA
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

madani/masyarakat sipil (*civil society*) di Indonesia sangat terasa dan penting dalam tatanan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan, dimana pada sebagian masyarakat muslim Indonesia terutama kalangan kelas menengah muslim modernis dan kalangan muslim tradisional yang berafiliasi pada NU mengalami pergeseran cara berpikir, bersikap dan bertindak terkait dengan relasi Islam dan politik-negara di Indonesia.

Secara lebih rinci dampak dari pemikiran politik Cak Nur dan Gus Dur sebagai berikut: *pertama*, secara kualitatif telah ditunjukkan oleh pola pemahaman dan pemikiran sebagian umat Islam terutama di kalangan kelas menengah muslim terpelajar yang inklusif, toleran, moderat dan rasional dalam memahami Islam dan mengartikulusikannya dalam kehidupan yang plural dan multikultural serta interaksi global. *Kedua*, adanya pengakomodasian pemerintah dengan menjadikan Islam Indonesia sebagai penggerak dan pendukung utama kokohnya negara bangsa (*nation state*). *Ketiga*, redupnya ketegangan ideologis antara Islam dengan Pancasila, dimana Pancasila dapat diterima sebagai common platform bagi umat Islam Indonesia dalam tatanan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Karena itu Pancasila diletakkan sebagai ideologi dan asas negara yang final dan tepat bagi bangsa Indonesia yang plural dan multikultural. *Keempat*, hadirnya wajah Islam Indonesia yang moderat, toleran, progresif dan berjalan beriringan dengan wacana kontemporer seperti demokrasi, hak asasi manusia, *good and clean governance*, multikulturalisme, gender dan isu-isu kontemporer lainnya. *Kelima*, dalam konteks demokratisasi di Indonesia selain karena perkembangan dan tuntutan global, juga disebabkan oleh adanya perubahan pola pikir baru di sebagian besar umat Islam Indonesia di dalam menyikapi relasi antara agama dengan politik seperti perlunya demokrasi dijadikan sebagai sistem dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas dan terbesar di dunia yang dapat mendukung tumbuhnya demokrasi. Hal itu menjadi antitesis dari berbagai pandangan ilmuwan politik barat yang berpandangan bahwa dunia Islam dan umat Islam tidak mampu menerapkan sistem demokrasi.

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Transisi demokrasi yang berjalan relatif damai di Indonesia pasca kejatuhan rezim otoriter tidak terlepas dari kontribusi yang diberikan umat Islam dan kaum intelektual muslim Indonesia yang di antaranya adalah Cak Nur dan Gus Dur. Hal ini menjadi bukti dari keberhasilan gerakan sosiokultural kewarganegaraan, yang berlangsung secara sinergetik antara kelompok masyarakat madani (*civil society*) yang tergabung dalam organisasi *civil society* (CSO), perorangan dengan eksponen mahasiswa dalam melakukan gerakan untuk menurunkan rezim otoriter Orde Baru pada tahun 1998. Dengan kehadiran gerakan sosiokultural yang dilakukan oleh Cak Nur dan Gus Dur tersebut, Indonesia beralih dari era demokrasi dan kekuasaan otoriter menuju era transisi demokrasi untuk memasuki era reformasi. Dan pada tahun 1999 Indonesia memasuki masa reformasi, di mana semua elemen bangsa bebas menyuarakan pendapat dan afiliasi politiknya, yang ditandai dengan berdirinya begitu banyak partai-partai politik.

Dalam konteks membangun dan menguatkan demokrasi di Indonesia yang tengah memasuki fase konsolidasi dan penguatan keberadaan masyarakat madani atau masyarakat sipil sebagai mitra strategis dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, menjadi tampak jelas kontribusi pemikiran dan gerakan sosiokultural dari Cak Nur dan Gus Dur. Sejarah mencatat peran Cak Nur dan Gus Dur dalam proses demokratisasi yang berujung pada lengsernya rezim pemerintahan otoriter Orde Baru menuju era transisi demokrasi dan era reformasi. Dalam era reformasi Cak Nur pernah berniat untuk mengikuti konvensi capres dari partai Golkar, meskipun langkah tersebut tidak jadi terjun dalam politik praktis khususnya dalam pencalonan presiden, tetapi *platform* yang telah dibuatnya, yakni sepuluh *platform* perubahan yang termuat dalam INDONESIA KITA, akhirnya menjadi inspirasi dan gagasan tersebut diadopsi oleh capres lain. Begitu juga upaya yang dilakukan Gus Dur dari gerakan sosiokultural menuju gerakan politik semakin memperkuat iklim dan budaya demokrasi serta tatanan hadirnya masyarakat sipil (*civil society*) serta tatanan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang semakin terbuka aksesnya bagi kelompok warga negara minoritas dan marginal dalam bingkai kewarganegaraan Indonesia.

B. Implikasi Penelitian

Abdul Rozak, 2015
 PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL
 MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA
 Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Hasil penelitian ini memberikan implikasi pada dimensi ontologis pada aspek obyek kajian dan obyek pengembangan dalam keilmuan pendidikan kewarganegaraan. Pada obyek kajian, sejauh ini dalam kurikulum Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan kajian tentang pemikiran politik baik pemikiran politik Barat, pemikiran politik Islam dan pemikiran politik Indonesia masih belum menjadi bagian dalam obyek kajian baik pada jenjang sarjana, magister dan doktor. Pemikiran politik sebagai nomenklatur mata kuliah di dalamnya terdapat tema-tema yang terkait langsung dengan substansi materi kajian pendidikan kewarganegaraan maupun tema-tema lain yang tidak secara langsung.

Keilmuan pendidikan kewarganegaraan sebagai disiplin ilmu yang mandiri dan berbentuk lintas disipliner serta interdisipliner sangat memerlukan kontribusi dari berbagai bidang ilmu agar eksistensi keilmuan pendidikan kewarganegaraan semakin kokoh dalam rumpun ilmu sosial (social studies). Dengan menjadikan pemikiran politik Cak Nur dan Gus Dur keilmuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia memiliki karakteristik yang selanjutnya menjadi nilai tambah dan nilai beda. Karena itu konsekwensi yang harus dilakukan terkait dengan hasil penelitian ini adalah melakukan rekonstruksi obyek kajian pendidikan kewarganegaraan bahkan merekonstruksi kurikulum Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan mulai jenjang sarjajan, magister dan doktor.

Menjadikan pemikiran politik terutama pemikiran politik yang digagas dan dikembangkan oleh para intelektual muslim Indonesia dalam obyek kajian pada kurikulum Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan merupakan langkah yang sangat strategis baik pada jenjang sarjana maupun jenjang magister dan doktor. Karena hal itu akan membuat tatanan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia sebagai negara bangsa, negara multikultur, negara multi agama dan negara yang mayoritas penduduknya muslim namun ideologi dan dasar bernegaranya berdasarkan Pancasila akan semakin kokoh. Pemikiran politik yang dikembangkan oleh para intelektual muslim terutama mereka yang berada dalam kelompok muslim neo-modernis senantiasa berupaya mendamaikan dan mencari formulasi pemecahan masalah

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

secara kreatif, konstruktif dan inovatif terkait dengan nilai-nilai dan substansi ajaran Islam dengan realitas sosial politik kebangsaan dan kenegaraan.

Pemahaman yang tepat terkait dengan relasi agama dan negara -Islam dan politik- pada masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat muslim pada khususnya telah menjadikan Islam sebagai pendorong kemajuan dan peradaban bangsa dalam memasuki tatanan dunia global. Kita semua menyadari bahwa potensi Islam Indonesia sangat besar. Perkembangan Islam di Indonesia telah menjadikan para Indonesianis dari berbagai negara luar baik Amerika, Eropa, Australia dan lain sebagainya melakukan kajian tentang Islam Indonesia yang tumbuh dan berkembang secara dinamis dan sinergik serta terjadi simbiotik mutualistik antara negara dengan umat Islam Indonesia dalam wadah negara Pancasila.

Bila komunitas akademik (*civic community*) pendidikan kewarganegaraan dalam hal ini para calon guru profesional mata pelajaran PKn dan para komunitas akademik PKn memiliki bekal pemahaman yang cukup tentang dialektika dan dinamika Islam Indonesia dalam relasinya dengan negara bangsa dan kultur keindonesiaan, akan terjadi transformasi yang sangat besar dan konstruktif dalam tatanan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan karena kematangan pemahaman, cara berpikir dan bertindak umat Islam yang merupakan kelompok mayoritas di Indonesia sebagai bangsa dan negara yang plural, multi agama dan multikultur. Transformasi itu terjadi berkat peran strategis para guru dan komunitas PKn dalam menjalankan misi pedagogisnya.

Keberhasilan Indonesia mengubah sistem politik pemerintahan dari rezim otoriterian menuju rezim demokrasi dan melewati masa transisi yang relatif damai telah membawa negeri ini yang mayoritas penduduknya beragama Islam sebagai kekuatan baru demokrasi dunia yang sangat diperhitungkan dan menjadi contoh utama dalam pengembangan demokrasi pada ranah kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Karena hal itu telah membantah *statement* dan teori yang dikemukakan para ilmuwan politik Barat antara lain Huntington (1991), Lewis (2002), Kedourie (1994), Lipset (1994), dan Gellner (1994) yang meragukan akan hadirnya negara demokrasi pada

negara yang penduduknya beragama Islam atau negara yang menjadikan Islam sebagai dasar dan ideologi bernegara.

Semakin membaiknya kualitas kehidupan keberagamaan di Indonesia dan kematangan berpikir dan bertindak di kalangan umat Islam merupakan bagian dari implikasi program besar yang telah dilakukan oleh para intelektual muslim terutama sejak era 1970-an yang dimotori oleh Cak Nur dan era 1980-an yang dimotori oleh Gus Dur dengan menggerakkan peran lembaga kajian keagamaan yang menerapkan paradigma baru yaitu kajian keagamaan tidak saja didekati secara normatif-doktrinal, melainkan dikaji dengan pendekatan empirik, historis dan menggunakan kerangka ilmu social-politik sebagai pijakan analisis terkait dengan masalah keagamaan Islam. Pola kajian keagamaan dengan paradigma baru ini digagas oleh Cak Nur sebagai langkah membangun tatanan masyarakat madani di Indonesia dengan target sarannya adalah kelompok kelas menengah terpelajar. Sedangkan upaya pemberdayaan lapisan masyarakat level *grassroot* melalui upaya menggerakkan lembaga sosial keagamaan seperti NU yang mempunyai basis massa pada level *grassroot*-masyarakat pedesaan- dan tradisional dalam rangka penguatan demokrasi dan masyarakat sipil. Pola ini dilakukan oleh Gus Dur. Jadi implikasi dari pemikiran politik dan gerakan sosiokultural kewarganegaraan yang dilakukan oleh Cak Nur dan Gus Dur telah merubah orientasi pemikiran politik dan pemahaman umat Islam Indonesia dari orientasi ideologis-formalistik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta pola pemahaman keagamaan yang tekstual-normatif doktrinal menjadi orientasi pemikiran politik yang substantif dan non ideologis serta pemahaman keagamaan yang kontekstual dan rasional.

C. Dalil-dalil Hasil Penelitian

1. Pemikiran politik dalam kaitan dengan relasi Islam dan negara atau Islam dan demokrasi berparadigma substantif dapat menjadi suatu model yang relevan bagi bangsa dan negara Indonesia sebagai negara bangsa yang multikultur dan multi agama serta multi etnis.
2. Eksistensi ideologi Pancasila dan bhineka tunggal ika diletakkan sebagai *kalimatun sawwa* dan sebagai platform dalam berbangsa dan bernegara bagi umat Islam

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Indonesia dapat mewujudkan deradikalisasi agama, menghindari tindakan kekerasan atas nama agama, menghindari tindakan terorisme, dan menghindari tindakan korupsi yang menjadi masalah akut bangsa dan negara.

3. Pengembangan dimensi ontologis keilmuan pendidikan kewarganegaraan Indonesia pada obyek kajian dan obyek pengembangan mengharuskan tema pemikiran politik dan gerakan sosiokultural kewarganegaraan kaum intelektual muslim Indonesia dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari materi kajian pendidikan kewarganegaraan persekolahan dan di perguruan tinggi;
4. Pemikiran politik kaum intelektual muslim neo-modernis dalam bidang demokrasi, *civil society*, etika politik, hak asasi manusia dan isu-isu sentral kewarganegaraan lainnya merupakan produk dialektis dan reflektif terkait dengan Islam sebagai agama yang tidak saja nilai dan ajarannya mengatur dimensi teologis *an sich*, melainkan memuat tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang disebut dengan dimensi mu'amalah. Namun demikian dalam implementasi praksisnya memerlukan pemahaman terhadap nilai dan ajaran Islam yang kontekstual, rasional dan dialektikal.
5. Mendesiminasikan pemikiran politik kaum intelektual muslim neo-modernis tentang relasi Islam dan negara, Islam dan demokrasi, Islam dan hak asasi manusia, Islam dan *civil society* yang dibingkai dengan kerangka bangunan *Islam rahmatan lil 'alamiin*, moderat, toleran dan kedamaian dalam negara bangsa di Indonesia menjadi keniscayaan. Karena itu perlu dilakukan upaya secara terprogram dan sistematis dengan menjadikannya sebagai bagian integral dari ontologi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik, pendidikan demokrasi dan HAM pada jalur pendidikan persekolahan (terutama mulai jenjang pendidikan menengah- pendidikan tinggi) dan jalur pendidikan kemasyarakatan akan semakin memperkuat keberadaan negara bangsa (*nation state*).
6. Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan politik, pendidikan demokrasi dan HAM memiliki potensi yang sangat besar dalam rangka terjadinya transformasi sosial warga negara Indonesia untuk menjadi warga negara yang cerdas, baik, bijak, ber peradaban, berwawasan dan berkemampuan interaksi global serta

berkeadaban yang santun (*civic virtue*) mulai dari lingkup persekolahan maupun lingkup kemasyarakatan.

7. Pendidikan kewarganegaraan perlu melakukan adopsi dan adaptasi serta inovasi baik berkaitan dengan materi kajian –kajian pemikiran politik kaum intelektual Islam neo-modernis-, maupun berkaitan dengan metodologi pembelajaran dan pengembangannya sesuai dengan tuntutan, dinamika dan tantangan zaman yang melingkupinya. Dengan paradigma seperti itu pendidikan kewarganegaraan akan senantiasa menemukan relevansinya sebagai instrumen dalam transformasi kewarganegaraan yang berkeadaban (*civil society*-masyarakat madani) dan mengawal terwujudnya demokrasi berkeadaban (*civility democracy*) di Indonesia.
8. Rekonstruksi ranah ontologis dan epistemologis dalam keilmuan pendidikan kewarganegaraan (PKn) dengan mempertimbangkan materi kajian pemikiran politik kaum intelektual muslim neo-modernis tentang relasi Islam dan negara, Islam dan demokrasi, Islam dan hak asasi manusia, Islam dan *civil society* yang dibingkai dengan kerangka bangunan *Islam rahmatan lil ‘alamiin*.
9. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan disiplin ilmu yang dikembangkan di LPTK pada jenjang sarjana untuk menyiapkan calon guru PKn persekolahan maupun pada jenjang magister dan doktor dalam rangka pengembangan keilmuan PKn akan semakin signifikan dan relevan dengan mengakomodasi pola gerakan sosiokultural kewarganegaraan Cak Nur dan Gus Dur sebagai metode transformasi sosial
10. Memasukkan pemikiran politik kaum intelektual muslim neo-modernis menjadi hal yang sangat strategis dan signifikan dalam memperkokoh jati diri keilmuan PKn sebagai pendidikan politik, pendidikan demokrasi dan HAM. Implikasi dari upaya tersebut, ranah aksiologis Pkn menjadi semakin kokoh dalam dinamika kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

D. Rekomendasi

Penelitian ini terbatas pada kedua tokoh intelektual muslim neo-modernis (Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid) terkait dengan pemikiran politik dan

Abdul Rozak, 2015

PEMIKIRAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN KAUM INTELEKTUAL MUSLIM NEO-MODERNIS DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA
Suatu Perspektif Keadaban Kewarganegaraan (*Civic Virtue*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

gerakan sosiokultural kewarganegaraan yang dilaksanakan oleh kedua tokoh tersebut. Karena itu peneliti merekomendasikan untuk dilakukan penelitian lanjutan dan kajian praksis sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap intelektual muslim lainnya yang berada dalam periode kehidupan yang sama dengan kedua intelektual muslim (Nucholish Madjid dan Abdurrahman Wahid) yang peneliti lakukan dalam rangka penguatan *body of knowledge* pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu disiplin ilmu mandiri;
2. Ruang lingkup obyek penelitian yang peneliti lakukan terhadap kedua intelektual muslim ini perlu dikembangkan lebih lanjut agar kajian terhadap kedua intelektual muslim ini (Nucholish Madjid dan Abdurrahman Wahid). Selain itu jumlah kaum intelektual yang dikaji perlu diperbanyak agar semakin komprehensif baik terkait dengan ide-gagasan maupun aktivitas yang dilaksanakannya;
3. Perlu dilakukan penelitian yang mendalam terhadap kedua intelektual muslim neo-modernis ini terkait dengan dampak dan kepengikutan kelompok masyarakat terhadap ide-gagasan dan langkah-langkah gerakan yang diakibatkan olehnya (Nucholish Madjid dan Abdurrahman Wahid);
4. Perlu dilakukan penelitian terhadap kedua intelektual neo-modernis ini maupun kaum intelektual muslim lainnya dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner berkaitan dengan ide-gagasan dan aktivitas yang dilakukannya (Nucholish Madjid dan Abdurrahman Wahid).
5. Perlu dilakukan penataan ulang terhadap materi kajian pendidikan kewarganegaraan dalam praksis pembelajaran yang dilakukan para guru dan terutama para dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan mempertimbangkan pemikiran politik Cak Nur dan Gus Dur sebagai obyek telaah atau kajian dalam kegiatan kurikuler maupun pada kurikulum Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan mulai jenjang strata satu (level 6), strata dua (level 8) dan strata tiga (level 9) agar terjadi penyempurnaan dan koherensi yang rasional.
6. Perlu dilakukan redesain kurikulum Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan mulai jenjang strata satu (level 6), strata dua (level 8) dan strata tiga (level 9) yang bercorak keindonesiaan sebagai dimensi partikularitas disamping dimensi

universalitas dari Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini akan menjadi nilai tambah dan pembeda terkait dengan obyek kajian pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dengan obyek kajian pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara pada umumnya. Karena telah menjadikan *local wisdom* sebagai muatan khusus dalam pendidikan kewarganegaraan. Dengan demikian PKn dapat menjadi wahana dan upaya preventif dalam kerangka deradikalisasi agama, tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama, tindakan terorisme yang dilakukan warga negara dan tindakan destruktif lainnya yang dapat menggoyahkan keutuhan NKRI.

7. Perlu dilakukan reformulasi metodologi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan baik pada jalur persekolahan maupun jalur pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan dengan mempertimbangkan pada pola gerakan sosiokultural dan metodologi penyajiannya sebagaimana yang dilakukan oleh Cak Nur dan Gus Dur agar tepat sasaran dan berdampak positif bagi pengembangan kesadaran, kepedulian, komitmen dan tanggungjawab kewarganegaraan.